



PROVINSI ACEH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 1 / DPRK / 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan, penyusunan dan pembentukan Qanun - Qanun Kabupaten Aceh Besar agar terencana, terpadu dan sistematis, harus dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah Kabupaten Aceh Besar;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka hasil penyusunan Program Legislasi Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang disepakati menjadi Program Legislasi Daerah Kabupaten Aceh Besar ditetapkan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 ( drt ) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sebagaimana Telah beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;

16. Qanun.....

16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Besar Hari Senin Tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan Jadwal Rapat Paripurna ke - 2 Masa Persidangan ke - II DPRK Aceh Besar Tahun Sidang 2018 - 2019 tentang Pengumuman Program Legislasi Daerah (Prolegda) Aceh Besar Tahun 2019 dan Penutupan Masa Persidangan Ke - II DPRK Aceh Besar Tahun Sidang 2018- 2019.
  2. Hasil Keputusan Badan Legislasi DPRK Aceh Besar dengan Bagian Hukum Setdakab Aceh Besar Hari Rabu Tanggal 11 Maret 2019 tentang Finalisasi Penetapan Jumlah Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dapat menyetujui penetapan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.

KETIGA....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho  
Pada Tanggal 28 Maret 2018 M  
21 Jumadil Akhir 1440 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BESAR

WAKIL KETUA,



ANSARI MUHAMMAD, S.Pt, M.Si

WAKIL KETUA,



ZULFIKAR, SH

KETUA,



SULAIMAN, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR : 1/DPRK/2019  
TANGGAL : 28 MARET 2019 M  
21 JUMADIL AKHIR 1440 H

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019

NO	NAMA RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019
1.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pembangunan Gedung.
2.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pemerintahan Dan Gampong.
3.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Irigasi.
4.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Kabupaten Aceh Besar.
6.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pemanfaatan Jalan.
7.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Mountala.
8.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kabupaten Aceh Besar.
9.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pendidikan Dan Pembinaan Karakter Anak Dalam Kabupaten Aceh Besar.
10.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah seulawah Raya.
11.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Aceh Besar.
12.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.
13.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pengelolaan Aset Daerah.
14.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
15.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Penangan Dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu Dan Fakir Miskin.

16.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
17.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Narkoba.
18.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Madrasah Diniyah Takmiliah.
19.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh.
20.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Aceh Besar.
21.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2019.
22.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern Dan Waralaba.
23.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
24.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
25.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pajak Hotel (Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame).
26.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pajak Restoran (Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame).
27.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pajak Hiburan (Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame).
28.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pajak Reklame (Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame).
29.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Mukim Persiapan Lamkuyet Kecamatan Darul Kamal.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BESAR

WAKIL KETUA



ANSARI MUHAMMAD, S.Pt. M.Si

WAKIL KATUA



ZULFIKAR, SH

KETUA



SULAIMAN, SE